

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 Keterwakilan Gender

Pemikiran Anne Phillips mengenai kesetaraan gender dan politik memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi setara di arena publik. Dengan menekankan pentingnya representasi substantif dan keberadaan fisik perempuan di lembaga-lembaga politik, Phillips mendorong perubahan yang lebih inklusif dan adil dalam struktur politik. Teorinya tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang kesetaraan gender di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana perjuangan untuk keterwakilan perempuan masih berlangsung.

Salah satu teori utama yang diajukan oleh Phillips adalah "politik kehadiran," yang menekankan pentingnya keberadaan fisik perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Menurutnya, representasi deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) harus sejalan dengan representasi substantif, di mana kepentingan dan pengalaman perempuan diwakili dalam kebijakan publik. Phillips berargumen bahwa partisipasi perempuan tidak hanya sekadar jumlah, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap perspektif unik yang mereka bawa ke dalam proses pengambilan Keputusan. (Sari, 2018)

Commented [HR1]: Sesuaikan paragraph dibawahnya

Phillips juga menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik adalah perbedaan antara ruang publik dan privat. Ia menyatakan bahwa laki-laki didorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik dan politik, sementara perempuan seringkali terbatas pada peran domestik, seperti menjaga rumah dan anak-anak mereka. Pemisahan ini menimbulkan ketidaksetaraan yang mendalam dan menghalangi perempuan untuk terlibat dalam proses politik. (Tias et al., 2023)

Phillips berpendapat bahwa meskipun ada aturan seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di legislatif, mereka seringkali hanya formalitas yang tidak memiliki makna. Ia menekankan bahwa perubahan struktural diperlukan dalam cara politik dipraktikkan dan dipahami untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. Ini mencakup mengubah cara representasi dilihat dari sudut pandang ideologis menjadi fakta di ruang pengambilan keputusan. (Tias et al., 2023)

2.1.3 Teori Gender

Teori gender menekankan bahwa peran dan tugas yang terkait dengan laki-laki dan perempuan adalah konstruksi sosial daripada biologis. Pandangan kyai tentang peran perempuan dalam politik dapat dipengaruhi oleh kebiasaan budaya dan agama. Misalnya, keyakinan tradisional bahwa perempuan seharusnya berkonsentrasi pada peran

Commented [HR2]: Rapihkan

domestik dapat memengaruhi persepsi agama terhadap keterwakilan perempuan di DPRD.

Teori gender memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, serta bagaimana hal ini mempengaruhi interaksi dalam Masyarakat. Teori gender sering kali dikaitkan dengan gerakan feminisme yang berjuang untuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. (Jayani et al., 2024)

2.1.4 Persepsi

Teori persepsi memberikan pemahaman penting tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Dengan memahami proses dan elemen yang mempengaruhi persepsi, kita dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena interpretasi yang berbeda dari informasi yang sama.

Persepsi memengaruhi sikap seseorang, dan sikap memengaruhi perilaku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa persepsi memengaruhi sikap seseorang, dan perilaku mencerminkan persepsi tersebut. Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung (objek) yang diterima melalui panca indera. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. (Hasanah et al., 2024)

Proses persepsi melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan rangsangan melalui panca indera, seleksi informasi, pengorganisasian data yang diterima, hingga interpretasi dan pemberian makna terhadap informasi tersebut. Proses ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan konteks sosial individu.

Teori persepsi memberikan wawasan penting tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Dengan memahami proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, kita dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial serta mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi akibat interpretasi yang berbeda terhadap informasi yang sama. (Hanik et al., 2024.)

2.1.5 Peran Kyai

Kyai, sebagai tokoh agama dan pemimpin komunitas di Indonesia, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik. Mereka sering kali menjadi rujukan dalam masalah-masalah sosial, termasuk isu-isu gender dan politik. Kyai seringkali bertindak sebagai agen perubahan sosial sebagai tokoh masyarakat. Mereka memiliki kekuatan besar untuk memperbaiki masyarakat di sekitar mereka sambil mempromosikan keadilan dan kerukunan antarumat beragama. Kyai dapat menyelesaikan konflik sosial dan menyelesaikan masalah masyarakat. (Nasution, 2017)

Dalam masyarakat tradisional, kyai dianggap sebagai yang paling berkuasa. Kyai dihormati dan dipercaya untuk memberikan bimbingan dalam hal keagamaan, sosial, dan politik. Orang-orang sering mendatangi mereka untuk mendapatkan nasihat tentang berbagai masalah kehidupan. Kyai kadang-kadang terlibat dalam politik sebagai perwakilan rakyat atau pejabat publik. Mereka sering berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan keinginan masyarakat serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.

Kyai memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat, budaya, dan keagamaan Indonesia. Kyai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan komunitas mereka karena mereka berfungsi sebagai pemimpin spiritual, pendidik, agen perubahan, dan otoritas dalam masyarakat. Dengan pengaruh besar ini, kyai tidak hanya menjadi tokoh agama tetapi juga memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis, keterwakilan perwakilan dalam pemilihan umum anggota DPRD di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Hany Asyifah Salsabila. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori keterwakilan elektoral menurut Hanna F. Pitkin (1967). Tujuan Penelitian Mengetahui faktor penghambat dan pendukung keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kota

Palembang. Meneliti upaya partai politik dalam menegakkan aturan tentang keterwakilan calon perempuan dalam proses pencalonan pemilu legislatif. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kota Palembang masih sangat rendah. Pada periode 2014-2019, terdapat 9 anggota DPRD perempuan (18%), yang turun menjadi 5 anggota (10%) pada periode 2019-2024. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan dan tidak memenuhi kuota 30% yang ditetapkan oleh pemerintah. Faktor penghambat adanya budaya patriaki yang masih kuat dalam masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan dalam politik. Kurangnya pendidikan politik, kurangnya kepercayaan diri, kurangnya dana operasional. (Salsabila et al., n.d.)

Penyebab Mininmnya Keterwakilan Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung Periode 2019-2024. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa populasi Perempuan cukup besar (49%), keterwakilan mereka di kredibilitas, aksesibilitas, dan strategi kampanye yang efektif dari calon Perempuan menjadi hambatan utama. Selain itu, pola rekrutmen partai politik yang tidak terencana juga berkontribusi pada masalah ini. (Riyanda et al., 2022)

Judul dan Penulis, Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019, Citra N. Fariaty. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penggambaran, analisis, dan penafsiran permasalahan terkait peran partai politik dalam

mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan konsep patriarki sebagai kerangka untuk memahami posisi perempuan dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa. Hasil dari jurnal ini, pada pemilihan legislatif 2019, hanya terdapat 4 kursi perempuan dari total 30 kursi di DPRD Kabupaten Mamasa, yang mencerminkan keterwakilan sebesar 13,33%. Meskipun terjadi peningkatan dari 6,66% pada tahun 2014, angka ini masih jauh dari yang diharapkan. Faktor penghambat, budaya patriaki, rendahnya pendidikan, kurangnya dukungan dari partai. (Fariaty, n.d.)

Judul dan Penulis, Perempuan dan Politik (Study tentang keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang), Eni Nur Wahyuni. Metode yang di gunakan deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena keterlibatan perempuan dalam politik secara holistik. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran perempuan dalam politik di Kabupaten Lumajang dan dampak positif serta negatif dari keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Hasil dari jurnal ini dari total 7.968 calon legislatif pada Pemilu 2019, hanya 40,95% (3.262) adalah perempuan, namun hanya sekitar 20% dari mereka yang terpilih sebagai anggota legislatif. Di Kabupaten Lumajang, dari 12 kursi DPRD yang diperebutkan, hanya terdapat lima anggota legislatif perempuan. Hambatan keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi banyak hambatan, termasuk diskriminasi dan

seksisme. Stereotip gender dan pandangan masyarakat yang menganggap perempuan seharusnya lebih fokus pada tugas domestik menjadi tantangan besar. (Wahyuni, n.d.)

Judul dan Penulis, Penyebab Minimnya Keterwakilan Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Si Jungjung Periode 2019-2024, Riko Riyanda, Zuhdi Arman, Riri Anggela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami permasalahan keterwakilan caleg perempuan di DPRD. Hasil dari jurnal ini Pada pemilu legislatif 2019-2024, hanya terdapat 3 anggota legislatif perempuan dari total 30 kursi di DPRD Kabupaten Sijunjung, menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan meskipun ada kebijakan kuota 30%. Faktor dan penyebab Kemampuan dan Kredibilitas, banyak caleg perempuan yang mengalami masalah dalam kemampuan, kredibilitas, dan aksesibilitas yang belum sepenuhnya teruji di daerah pemilihannya, Rekrutmen Partai, proses rekrutmen dan kaderisasi oleh partai politik cenderung dilakukan secara instan dan tidak terencana, sehingga calon laki-laki lebih dominan dalam menarik perhatian masyarakat, Kurangnya Strategi dan faktor lainnya. (Riyanda et al., 2022)

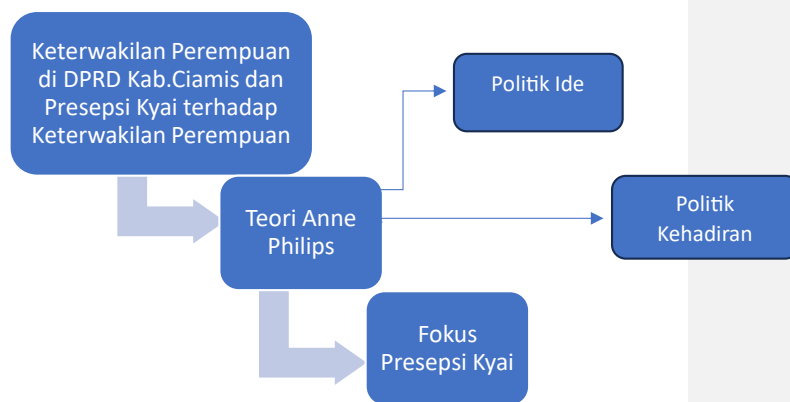
Judul dan Penulis, Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh Periode 2013-2019, I Nyoman Adi Jaya Prawira, Bandiyah, Muhammad Ali Azhar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data mendalam mengenai keterwakilan politik perempuan dalam BPD, dengan Pendekatan deskriptif digunakan untuk

menggambarkan dan menganalisis fenomena keterwakilan anggota perempuan dalam BPD. Hasil dari jurnal ini terdapat tiga anggota perempuan di BPD Desa Sanur Kauh, yang memenuhi kuota hampir 30% dari total anggota. Namun, meskipun jumlah ini tergolong baik, pengaruh dan keberdayaan mereka dalam mengambil keputusan masih terbatas. Hambatan yang dihadapi, aspirasi yang diajukan oleh anggota perempuan sering kali tidak mendapatkan prioritas dalam proses pengambilan keputusan, yang lebih didominasi oleh anggota laki-laki, terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan program-program yang menguntungkan perempuan, dan partisipasi perempuan dalam kegiatan desa masih rendah. (Prawira et al.,)

Judul dan Penulis, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2023, Luthfiah Ramadhani, Citra Amalia, Dewi Sekar Ayuning Cahya, Dwi Ayu Kumala Sari, Nazhiifa Zalfa Dementieva, Ita Meilidia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Semarang. Hasil dari jurnal ini keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya mencapai 18%, jauh dari target kebijakan afirmasi yang mengharuskan minimal 30%. Dari total 50 anggota, hanya 9 yang merupakan perempuan. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang masih jauh dari harapan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural agar perempuan dapat

berpartisipasi lebih aktif dalam politik dan mewakili kepentingan perempuan secara efektif. (Ramadhani et al., 2024)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Teori Anne Phillips, yang menekankan pentingnya representasi substantif dan deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis dan persepsi kyai terhadap keterwakilan perempuan. Menurut teori ini, perempuan harus hadir dalam politik untuk memenuhi kuota dan memastikan bahwa suara dan aspirasi mereka terwakili secara efektif dalam pengambilan keputusan. Aspek Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Kabupaten Ciamis, Keterwakilan perempuan di dewan mencerminkan jumlah perempuan yang terwakili di lembaga

legislatif, yang penting untuk memastikan bahwa pendapat perempuan didengar dalam pembuatan kebijakan. Selain jumlah, penting juga untuk memikirkan bagaimana perempuan yang terpilih dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang mendukung kepentingan perempuan.

Sebagai tokoh agama, kyai memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, dan cara kyai melihat keterwakilan perempuan dapat memengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan. Jika kyai melihat keterwakilan perempuan dengan cara yang baik, mereka dapat mendorong masyarakat untuk memilih perempuan dalam pemilihan umum, sedangkan jika mereka melihatnya dengan cara yang buruk, mereka dapat menghambat partisipasi perempuan. Menurut teori Anne Phillips, representasi perempuan dalam politik merupakan langkah penting menuju keadilan sosial. Ketidakadilan gender dapat diatasi oleh perwakilan perempuan di DPRD. Persepsi kyai terhadap keterwakilan perempuan dapat berdampak pada seberapa banyak perempuan yang terlibat dalam politik, yang pada gilirannya berdampak pada keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

Keterhubungan antara keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis dan persepsi kyai menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, penting untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat, terutama yang dipengaruhi oleh tokoh agama. Teori Anne Phillips memberikan kerangka untuk

memahami pentingnya representasi yang adil dan inklusif dalam politik.